



Nomor : 138 /HM.00.02/K.LA-14/06/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

Perkuat Pengawasan dan SDM, Bawaslu Bandar Lampung Gandeng Fakultas Hukum Malahayati

Bandar Lampung, 16 Juni 2025 – Dalam upaya memperkuat sinergi antara lembaga penyelenggara pengawas pemilu dengan perguruan tinggi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Fakultas Hukum Universitas Malahayati Lampung tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Kedua Belah Pihak.

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Apriliwanda, S.H., Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan Aditia Arief Firmanto, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati Lampung, bertempat di Bandar Lampung. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendorong penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan mutu sumber daya manusia, baik di lingkungan Bawaslu maupun civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Malahayati.

Ruang Lingkup Kerjasama

Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam beberapa bidang, antara lain:

- 1) Pemanfaatan bersama sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pembelajaran;
- 2) Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- 3) Kegiatan pengawasan partisipatif yang melibatkan dosen dan mahasiswa; serta;
- 4) Kegiatan lain yang disepakati bersama untuk mendukung fungsi kelembagaan dan pendidikan hukum yang aplikatif.

Dukungan Pengawasan Partisipatif

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, S.H., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Bawaslu dalam

memperluas jejaring pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi. "Kami berharap melalui kerja sama ini, mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat pengawasan Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, serta berintegritas," ujar Apriliwanda.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati Lampung, Aditia Arief Firmanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik sinergi ini sebagai sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa. "Mahasiswa tidak hanya belajar teori hukum di ruang kelas, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dalam praktik pengawasan Pemilu. Ini menjadi pengalaman akademik sekaligus bentuk kontribusi nyata terhadap demokrasi," ungkap aditia.

Jangka Waktu dan Implementasi

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 tahun, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 hingga 16 Juni 2029. Implementasi kegiatan akan meliputi kuliah kunjungan, pelatihan teknis, pengawasan partisipatif, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Komitmen Bersama

Kedua pihak berkomitmen menjaga profesionalitas, independensi, dan kerahasiaan informasi selama berlangsungnya kerja sama, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah untuk mufakat.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terbangunnya kemitraan berkelanjutan antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam memperkuat pendidikan hukum, menanamkan nilai integritas, serta menumbuhkan kesadaran politik dan demokrasi di kalangan generasi muda.